

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan (*agency theory*) merupakan salah satu teori menjelaskan dalam bidang ekonomi dan akuntansi yang menjelaskan hubungan kontraktual antara pihak yang memberikan amanah atau wewenang (*principal*) dan pihak yang menerima amanah tersebut untuk melaksanakan suatu tugas (*agent*). Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan hubungan keagenan sebagai suatu kontrak di mana satu atau lebih pihak (*principal*) melibatkan pihak lain (*agent*) untuk melakukan pekerjaan atas nama mereka, termasuk dalam hal pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya organisasi. Dalam hubungan ini, *principal* mempercayakan sebagian kewenangan dan sumber daya kepada *agent* dengan harapan bahwa *agent* akan bertindak sesuai kepentingan *principal*. Namun, teori keagenan juga mengakui adanya potensi konflik kepentingan apabila *agent* tidak sepenuhnya bertindak selaras dengan kepentingan *principal*.

Prinsip utama dalam teori keagenan adalah adanya asimetri informasi (*information asymmetry*) dan konflik kepentingan (*conflict of interest*) antara *principal* dan *agent*. Asimetri informasi terjadi karena *agent* memiliki pengetahuan yang lebih rinci mengenai aktivitas dan kondisi organisasi dibandingkan *principal*, sehingga menimbulkan kesulitan bagi *principal* dalam menilai kinerja *agent* secara objektif.

Keterkaitan teori keagenan (*agency theory*) dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan antara pemerintah sebagai *principal* dan pegawai atau manajemen BPP sebagai *agent*. Pemerintah memberikan wewenang kepada BPP untuk mengelola dana publik yang digunakan dalam pelatihan pertanian, pengembangan petani, serta kegiatan administratif lainnya. Masyarakat, melalui pemerintah, berharap bahwa BPP akan melaksanakan tugasnya secara

efisien, transparan, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun, potensi konflik dapat muncul apabila pegawai atau manajemen tidak menjalankan kewenangan tersebut secara akuntabel, misalnya dalam hal pengelolaan anggaran, pencatatan transaksi, atau penyusunan laporan keuangan.

Untuk mengatasi potensi konflik tersebut, Sistem Informasi Akuntansi (SIA) dan pengendalian internal berperan sebagai mekanisme pengawasan dan pelaporan yang dapat mempersempit kesenjangan informasi antara pemerintah dan pengelola anggaran di BPP. SIA berfungsi menyediakan informasi keuangan yang akurat, lengkap, dan tepat waktu sehingga dapat menjadi dasar pengambilan keputusan dan penilaian kinerja oleh pihak *principal*. Sementara itu, pengendalian internal memastikan bahwa seluruh proses keuangan berjalan sesuai prosedur, mengurangi risiko kesalahan, dan mencegah terjadinya penyimpangan. Kedua sistem ini saling melengkapi dalam menciptakan transparansi serta memperkuat akuntabilitas laporan keuangan di lingkungan BPP.

Berdasarkan teori keagenan, penelitian ini memandang bahwa penerapan SIA dan pengendalian internal merupakan bentuk implementasi dari mekanisme kontrol yang dirancang untuk menjaga keseimbangan hubungan antara *principal* dan *agent* dalam organisasi publik. Ketika kedua sistem tersebut dijalankan secara efektif, maka akuntabilitas laporan keuangan BPP akan meningkat, kepercayaan pemerintah terhadap kinerja lembaga akan semakin kuat, dan potensi konflik keagenan dapat diminimalisasi. Oleh karena itu, teori keagenan menjadi landasan teoritis utama dalam menganalisis bagaimana penerapan sistem informasi akuntansi dan pengendalian internal dapat meningkatkan transparansi serta pertanggungjawaban keuangan pada Balai Pelatihan Pertanian Kecamatan Dayeuhluhur.

2.1.2 Teori *Technology Acceptance Model* (TAM)

Menurut Santi & Erdani (2021), *Technology Acceptance Model* (TAM) merupakan teori yang diperkenalkan oleh Davis pada tahun 1986 untuk menjelaskan tingkat penerimaan pengguna terhadap suatu teknologi baru. Teori ini menjelaskan perilaku seseorang dalam menggunakan sistem teknologi melalui dua konsep utama, yaitu *perceived usefulness* (PU) dan *perceived ease of use* (PEOU). *Perceived usefulness* menggambarkan keyakinan pengguna bahwa suatu sistem mampu meningkatkan kinerja atau efektivitas pekerjaan. *Perceived ease of use* menunjukkan keyakinan bahwa sistem tersebut mudah dipahami dan digunakan tanpa memerlukan usaha yang besar. Kedua konsep tersebut menjadi dasar dalam memahami berbagai faktor yang mempengaruhi penerimaan pengguna terhadap suatu teknologi.

Dahlan et al. (2020) menjelaskan bahwa TAM berkembang dari pendekatan psikologis yang menekankan bahwa penerimaan seseorang terhadap teknologi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor tersebut berkaitan dengan kepercayaan (*belief*), sikap (*attitude*), minat untuk menggunakan teknologi (*intention*), serta perilaku pengguna (*user behavior*) dalam memanfaatkan sistem teknologi. Keempat aspek tersebut berperan dalam menentukan keputusan individu maupun organisasi untuk mengadopsi dan menggunakan teknologi dalam kegiatan operasional.

Beberapa faktor yang mempengaruhi penerimaan suatu sistem teknologi dalam teori TAM antara lain sebagai berikut:

a. *Intention to Use*

Intention to Use menggambarkan tingkat minat atau keinginan pengguna dalam memanfaatkan suatu sistem teknologi. Minat tersebut muncul karena adanya ketertarikan terhadap perkembangan teknologi serta keyakinan bahwa teknologi tersebut dapat membantu menyelesaikan pekerjaan secara lebih efektif. Dalam lingkungan organisasi, tingkat minat penggunaan

teknologi dapat mempengaruhi keberhasilan penerapan suatu sistem informasi (Davis, 1989).

b. *Ease of Use*

Ease of Use menunjukkan tingkat keyakinan pengguna bahwa suatu sistem teknologi mudah dipahami dan digunakan. Sistem yang dianggap sederhana dan tidak rumit cenderung lebih mudah diterima oleh pengguna. Kemudahan penggunaan tersebut dapat membantu meningkatkan efektivitas pekerjaan serta mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pengolahan data di dalam organisasi (Davis, 1989).

c. *Perceived Security*

Perceived Security mengacu pada tingkat kepercayaan pengguna terhadap keamanan sistem teknologi yang digunakan. Pengguna akan lebih bersedia memanfaatkan suatu sistem apabila mereka merasa bahwa data dan informasi yang tersimpan di dalam sistem tersebut aman dari berbagai risiko, seperti kebocoran data atau penyalahgunaan informasi (Venkatesh & Davis, 2000). Konsep TAM yang dikembangkan oleh Davis memberikan kerangka pemahaman mengenai perilaku individu maupun organisasi dalam menerima dan menggunakan sistem teknologi. Teori ini membantu peneliti dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan teknologi sekaligus memahami kemampuan pengguna dalam beradaptasi dengan sistem teknologi yang digunakan dalam suatu organisasi (Venkatesh et al., 2003).

Penelitian ini menggunakan teori *Technology Acceptance Model* (TAM) untuk menganalisis penerimaan serta penggunaan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) oleh pegawai di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Dayeuhluhur. Fokus penelitian diarahkan pada pemahaman mengenai persepsi pegawai terhadap manfaat (*usefulness*) dan kemudahan penggunaan (*ease of use*) sistem informasi akuntansi dalam mendukung pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan. Penerimaan yang baik terhadap SIA diharapkan mampu meningkatkan ketepatan dalam pencatatan

transaksi, ketepatan waktu pelaporan keuangan, serta memperkuat pelaksanaan pengendalian internal.

Pendekatan teori TAM juga digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan Sistem Informasi Akuntansi dalam mendukung akuntabilitas laporan keuangan di BPP Kecamatan Dayeuhluhur. Pemahaman terhadap persepsi dan sikap pengguna terhadap teknologi tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai peluang maupun kendala yang dihadapi dalam penerapan sistem informasi akuntansi pada instansi pemerintah, khususnya pada sektor pertanian.

2.2 Akuntabilitas Laporan Keuangan

2.2.1 Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas dianggap sebagai prinsip utama dalam pengelolaan keuangan publik, yang mengharuskan setiap entitas yang menangani dana publik untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan wewenangnya secara transparan dan dapat diandalkan. Menurut Mardiasmo (2018), akuntabilitas didefinisikan sebagai kewajiban pemegang amanah (agent) untuk menyampaikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan semua aktivitas serta hasil kerja mereka kepada pemberi amanah (principal) yang berhak dan berwenang meminta pertanggungjawaban tersebut. Dalam laporan keuangan, akuntabilitas berarti penyampaian informasi keuangan yang jujur, transparan, dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Mahmudi (2020) menekankan bahwa laporan keuangan pemerintah bukan sekadar instrumen pelaporan administratif, melainkan juga alat bagi masyarakat untuk mengevaluasi seberapa baik pemerintah mengelola dana publik secara efisien, efektif, dan sesuai peraturan.

Mardiasmo (2018) menjelaskan bahwa akuntabilitas terbagi menjadi dua macam, yaitu akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal:

1. Akuntabilitas Vertikal (*Vertical Accountability*)

Akuntabilitas vertikal merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan dana dan pelaksanaan tugas kepada otoritas yang lebih tinggi. Contohnya, unit-unit kerja atau dinas bertanggung jawab kepada pemerintah daerah, sedangkan pemerintah daerah bertanggung jawab kepada pemerintah pusat. Pola pertanggungjawaban ini menunjukkan adanya hubungan hierarkis dalam sistem pemerintahan, di mana setiap tingkatan wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan program dan penggunaan sumber daya kepada pihak yang memiliki kewenangan di atasnya.

2. Akuntabilitas Horizontal (*Horizontal Accountability*)

Akuntabilitas horizontal adalah bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat luas, baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan rakyat seperti DPR atau DPRD. Bentuk akuntabilitas ini menekankan pentingnya transparansi dan keterbukaan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga masyarakat dapat menilai sejauh mana lembaga publik menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik.

Menurut Mardiasmo (2018) akuntabilitas publik yang harus dijalankan oleh organisasi sektor publik memiliki empat dimensi Akuntabilitas yang harus di penuhi oleh organisasi sektor public yaitu sebagai berikut:

a. Akuntabilitas Kejujuran

Akuntabilitas kejujuran berkaitan dengan upaya mencegah penyalahgunaan wewenang atau (*abuse of power*)

b. Akuntabilitas Hukum (*Accountability for Probity and Legality*)

Berhubungan dengan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta ketentuan lain yang mengatur penggunaan dana publik. Kedua aspek ini menjamin integritas dan legalitas dalam setiap tindakan penyelenggara pemerintahan.

c. Akuntabilitas Proses (*Process Accountability*)

Akuntabilitas proses menilai apakah prosedur yang digunakan dalam pelaksanaan tugas sudah tepat dan efisien. Hal ini meliputi kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, serta prosedur administrasi yang mendukung terciptanya pengelolaan keuangan yang transparan dan akurat.

d. Akuntabilitas Program (*Program Accountability*)

Akuntabilitas program berfokus pada sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Selain itu, dimensi ini menilai apakah lembaga publik telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil terbaik dengan penggunaan sumber daya yang minimal.

e. Akuntabilitas Kebijakan (*Policy Accountability*)

Akuntabilitas kebijakan merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, atas kebijakan yang diambil kepada DPR/DPRD dan masyarakat luas. Dimensi ini memastikan bahwa setiap kebijakan publik yang dihasilkan telah mempertimbangkan kepentingan masyarakat serta memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan umum. Dengan demikian, akuntabilitas dalam sektor publik tidak hanya terbatas pada kepatuhan administratif, tetapi juga mencakup tanggung jawab moral, hukum, prosedural, programatik, dan kebijakan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif, serta berorientasi pada kepentingan publik.

2.2.2 Pengertian Laporan Keuangan

Laporan Keuangan adalah media informasi yang dapat merangkum semua kegiatan di perusahaan maupun instansi atau gambaran tentang keadaan keuangan perusahaan. Laporan Keuangan juga merupakan hasil akhir dari proses akuntansi dalam suatu operasi perusahaan. Menurut Harahap (2004), laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses

akuntansi yang berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi keuangan kepada pihak eksternal. Dengan demikian, laporan keuangan dapat dipahami sebagai bentuk komunikasi informasi keuangan yang disajikan dalam satuan moneter, menggambarkan aktivitas serta kondisi keuangan suatu entitas. Secara umum, laporan keuangan berisi catatan informasi keuangan suatu organisasi dalam periode tertentu yang bertujuan untuk menunjukkan kinerja dan posisi keuangan entitas tersebut. Laporan ini disusun secara sistematis agar dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai transaksi serta perubahan yang terjadi selama periode akuntansi. Data akuntansi yang diolah dengan baik akan menghasilkan informasi yang bermakna, sehingga penyusunan laporan keuangan menjadi sarana penting dalam mencapai tujuan pelaporan, yaitu menyediakan informasi yang relevan dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi maupun penilaian kinerja organisasi.

2.2.3 Tujuan Laporan Keuangan

Laporan keuangan memiliki beberapa tujuan utama yang hendak dicapai, terutama bagi pemilik usaha dan manajemen perusahaan. Laporan keuangan disusun untuk memenuhi kepentingan berbagai pihak yang memiliki hubungan dan kepentingan terhadap perusahaan. Menurut Hery (2016), tujuan laporan keuangan adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu, meliputi aset, liabilitas, ekuitas, serta hasil usaha yang telah dicapai selama beberapa periode.
- 2) Untuk mengetahui kelemahan-kelemahan yang menjadi kekurangan perusahaan.
- 3) Untuk mengetahui kekuatan-kekuatan yang menjadi keunggulan perusahaan.
- 4) Untuk menentukan langkah-langkah perbaikan yang perlu dilakukan di masa mendatang, khususnya yang berkaitan dengan posisi keuangan perusahaan saat ini.

- 5) Untuk mengetahui penilaian terhadap kinerja manajemen.
- 6) Sebagai alat pembanding dengan perusahaan sejenis, terutama terkait hasil usaha yang telah dicapai.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan gambaran mengenai kondisi keuangan perusahaan secara menyeluruh serta mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang dimiliki. Informasi tersebut menjadi dasar bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk menilai kinerja perusahaan dan merumuskan strategi pengembangan di masa mendatang.

2.3 Sistem Informasi Akuntansi (SIA)

Menurut Romney dan Steinbart (2018), sistem informasi akuntansi didefinisikan sebagai suatu sistem yang dirancang untuk mengumpulkan, mencatat, menyimpan, serta mengolah data guna menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi para pengambil keputusan. Sistem ini mencakup berbagai unsur seperti sumber daya manusia, prosedur dan instruksi kerja, data, perangkat lunak, infrastruktur teknologi informasi, serta mekanisme pengendalian internal dan keamanan yang mendukung proses tersebut.

Menurut Bodnar dan Hopwood (2013), yang menjelaskan bahwa SIA adalah kumpulan sumber daya seperti manusia dan peralatan yang digunakan untuk mengubah data keuangan menjadi informasi yang dapat dikomunikasikan kepada pengguna untuk mendukung keputusan ekonomi. Dari kedua pandangan tersebut, terlihat bahwa sistem informasi akuntansi tidak hanya berfungsi untuk mencatat transaksi, tetapi juga berperan dalam menghasilkan informasi yang relevan, akurat, dan andal bagi berbagai pihak yang membutuhkan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa SIA merupakan komponen penting dalam sistem pengelolaan keuangan organisasi karena membantu proses pengendalian internal, mendukung pengambilan keputusan, serta meningkatkan akuntabilitas dalam penyajian laporan keuangan.

Sementara itu, peneliti terdahulu Simarmata dan Afriani (2021) menjelaskan bahwa sistem informasi akuntansi adalah suatu kesatuan yang terdiri atas komponen-komponen, baik yang bersifat fisik maupun nonfisik, yang saling terintegrasi dan bekerja sama secara sistematis untuk mengolah data transaksi keuangan menjadi informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan. Setiap sistem informasi akuntansi memiliki komponen yang saling berhubungan dan bekerja secara terpadu.

Hall (2016) menyatakan bahwa Sistem Informasi Akuntansi (SIA) terdiri dari tiga komponen utama, yaitu input, proses, dan output:

a. Input

Merupakan data mentah yang diperoleh dari aktivitas operasional organisasi, seperti catatan transaksi penjualan, pembelian, pengeluaran, dan penerimaan kas. Data ini dikumpulkan secara sistematis dari sumber-sumber seperti faktur, bukti pembayaran, dan dokumen keuangan lainnya. Fungsi utamanya adalah menyediakan bahan baku yang akurat dan lengkap untuk diproses, sehingga memastikan keandalan informasi yang dihasilkan. Tanpa input berkualitas, proses pengolahan data dapat terganggu dan mengakibatkan kesalahan dalam laporan keuangan.

b. Proses

Melibatkan serangkaian langkah atau prosedur yang diterapkan untuk mentransformasi data input menjadi informasi yang bermakna. Ini mencakup aktivitas seperti pengklasifikasian data, penghitungan, verifikasi, dan analisis menggunakan perangkat lunak akuntansi atau sistem komputerisasi. Proses ini dirancang untuk meminimalkan kesalahan manusia, memastikan konsistensi, dan menghasilkan data terstruktur. Misalnya, data transaksi diolah melalui entri ke dalam jurnal, pembuatan buku besar, dan penyusunan neraca percobaan. Efektivitasnya bergantung pada desain sistem yang baik, termasuk kontrol internal untuk mencegah manipulasi atau kesalahan.

c. Output

Adalah produk akhir dari pengolahan data, yang biasanya berbentuk laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, dan arus kas, serta informasi

tambahan seperti analisis rasio keuangan atau laporan manajemen. Output ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan pengguna internal (seperti manajer dan auditor) dan eksternal (seperti investor dan regulator) dalam pengambilan keputusan. Output harus akurat, tepat waktu, dan mudah dipahami, sehingga mendukung transparansi dan akuntabilitas organisasi. Dalam praktiknya, output SIA sering disajikan dalam format digital atau cetak, dan dapat disesuaikan.

Di samping ketiga komponen pokok tersebut, Romney dan Steinbart (2018) menyatakan bahwa efektivitas penerapan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) juga sangat dipengaruhi oleh sejumlah elemen pembantu, yakni tenaga kerja, peralatan fisik, program komputer, serta mekanisme operasional yang dilaksanakan dengan konsistensi tinggi:

1. Tenaga Kerja

Elemen ini meliputi orang-orang yang terlibat dalam pengelolaan SIA, seperti para akuntan, auditor, dan personel teknologi informasi yang memiliki keahlian teknis serta pemahaman mendalam tentang akuntansi. Mereka diberi tanggung jawab untuk memasukan data, mengontrol proses, dan menganalisis hasil. Pendidikan berkala serta peningkatan kemampuan dianggap penting untuk menghadapi tantangan seperti kemajuan teknologi atau aturan baru. Jika tenaga kerja yang kompeten tidak tersedia, risiko error manusia akan naik, yang berpotensi menurunkan kredibilitas data keuangan. Misalnya, di perusahaan besar, tenaga kerja ini perlu diberikan latihan untuk menjalankan aplikasi akuntansi mutakhir agar kesalahan manual dapat dikurangi.

2. Peralatan Fisik

Elemen ini adalah struktur fisik yang menopang SIA, mencakup komputer, server, jaringan komputer, dan media penyimpanan seperti hard drive atau penyimpanan awan. Peralatan fisik yang kuat memungkinkan pengolahan data berjalan cepat dan terlindungi, serta menghindari masalah seperti sistem mati. Pemilihan peralatan fisik harus disesuaikan dengan ukuran operasi organisasi; contohnya, bisnis kecil mungkin cukup menggunakan komputer meja, sementara bisnis besar membutuhkan server

awan untuk fleksibilitas. Penggabungan peralatan fisik dengan komponen lain, seperti program komputer, krusial untuk mencegah ketidakcocokan yang bisa berujung pada hilangnya data atau celah keamanan.

3. Program Komputer

Elemen ini terdiri dari aplikasi dan perangkat lunak yang digunakan untuk menangani data akuntansi, seperti sistem ERP (Enterprise Resource Planning) atau perangkat lunak spesifik seperti Oracle atau Microsoft Dynamics. Program ini harus dibuat untuk mengeksekusi proses input, transformasi, dan output secara otomatis, sambil menyediakan lapisan keamanan seperti enkripsi data. Update rutin diperlukan untuk memperbaiki bug, memperkuat keamanan, dan menyesuaikan dengan norma akuntansi terkini. Jika program komputer yang cocok tidak ada, pengolahan data akan melambat dan mudah salah, sehingga efisiensi SIA secara keseluruhan berkurang.

4. Mekanisme Operasional

Elemen ini mengarah pada norma, panduan, dan prosedur standar yang konsisten dalam pengoperasian SIA, termasuk kontrol internal seperti persetujuan transaksi, pemeriksaan rutin, dan langkah pencadangan data. Mekanisme ini menjamin bahwa seluruh bagian sistem berfungsi sesuai dengan etika akuntansi yang baik dan ketentuan hukum, sehingga mencegah kecurangan atau penyimpangan. Konsistensi dalam mekanisme operasional juga memfasilitasi integrasi antar komponen, memungkinkan sistem untuk menghasilkan informasi yang tepat dan dapat dipercaya. Sebagai ilustrasi, mekanisme operasional yang solid mencakup pembagian tugas (*segregation of duties*) untuk menekan risiko error atau manipulasi, yang akhirnya memperkuat kepercayaan pada output SIA.

Tujuan utama dari sistem informasi akuntansi adalah menghasilkan informasi keuangan yang akurat, relevan, dan disampaikan tepat waktu agar dapat digunakan oleh manajemen dalam proses pengambilan keputusan yang efektif. Menurut Krismiaji (2015), SIA memiliki beberapa tujuan utama, yaitu menyediakan informasi bagi pengelolaan kegiatan bisnis, mendukung

operasional harian organisasi, serta menjamin keandalan laporan keuangan melalui penerapan sistem pengendalian internal yang baik.

Dengan adanya sistem informasi akuntansi, organisasi dapat memastikan bahwa seluruh aktivitas keuangannya tercatat dan dilaporkan dengan benar. Informasi yang dihasilkan dari SIA juga membantu manajemen dalam merencanakan, mengendalikan, dan mengevaluasi kinerja keuangan organisasi. Selain itu, penerapan SIA yang efektif mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan operasional, serta memperkuat akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan sistem informasi akuntansi tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada integrasi antara manusia, prosedur, dan pengendalian internal yang diterapkan secara konsisten dalam organisasi.

Dengan demikian, penerapan sistem informasi akuntansi di BPP Kecamatan Dayeuhluhur diharapkan dapat memperkuat mekanisme akuntabilitas lembaga melalui penyediaan informasi keuangan yang relevan, andal, serta tepat waktu. Implementasi SIA yang terintegrasi dengan sistem pengendalian internal juga akan mendukung terciptanya tata kelola keuangan yang transparan dan efisien, sesuai dengan prinsip *good governance* yang diterapkan dalam lembaga publik.

2.4 Pengendalian Internal

Pengendalian internal merupakan elemen krusial dalam kerangka manajemen organisasi, yang bertujuan memastikan keakuratan laporan keuangan, efisiensi operasional, serta kesesuaian dengan kebijakan dan regulasi yang berlaku. Berdasarkan *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* atau COSO (2013), pengendalian internal didefinisikan sebagai proses yang dilaksanakan oleh dewan direksi, manajemen, dan semua personel organisasi, yang dirancang untuk menyediakan jaminan memadai terkait pencapaian tujuan organisasi dalam tiga aspek pokok, yakni efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan, serta kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku. Dalam kesamaan pandangan tersebut, Mulyadi (2016) mengartikan

pengendalian internal sebagai struktur organisasi, metode, dan langkah-langkah yang terkoordinasi untuk melindungi aset organisasi, memverifikasi akurasi dan keandalan data akuntansi, meningkatkan efisiensi, serta mendorong kepatuhan terhadap kebijakan manajemen.

Krismiaji (2015) menjelaskan bahwa pengendalian internal berfungsi untuk memastikan semua aktivitas organisasi berjalan sesuai dengan rencana dan kebijakan yang telah ditetapkan, sehingga risiko kesalahan dan penyimpangan dapat diminimalkan. Dari berbagai pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal merupakan proses yang bersifat integral dan melibatkan semua komponen organisasi untuk mencapai tujuan dengan cara menjamin keandalan informasi keuangan, melindungi aset organisasi, serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

Menurut kerangka COSO (2013), pengendalian internal mencakup lima komponen utama yang saling berhubungan dan membentuk sistem yang menyeluruh untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif:

a. Lingkungan Pengendalian

Merupakan fondasi dari seluruh sistem pengendalian internal. Komponen ini mencerminkan integritas, nilai etika, dan kompetensi personel di dalam organisasi. Lingkungan pengendalian juga mencakup struktur organisasi, peran pimpinan, serta budaya kerja yang menekankan tanggung jawab dan akuntabilitas.

b. Penilaian Risiko

Meliputi proses identifikasi dan analisis risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi. Melalui penilaian ini, manajemen dapat menentukan tindakan pengendalian yang tepat untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko yang signifikan.

c. Aktivitas Pengendalian

Berupa kebijakan, prosedur, dan praktik yang dirancang untuk memastikan arahan manajemen dijalankan dengan baik. Contohnya termasuk otorisasi transaksi, pemeriksaan kinerja, serta pemisahan tugas untuk mencegah kesalahan atau kecurangan

d. Informasi dan Komunikasi

Bertujuan untuk menjamin bahwa informasi yang relevan dan andal tersedia serta disampaikan kepada pihak yang membutuhkan tepat waktu. Komponen ini memastikan setiap individu memiliki pemahaman yang cukup untuk melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif.

e. Pemantauan (*Monitoring*)

Merupakan kegiatan evaluasi berkelanjutan terhadap efektivitas sistem pengendalian internal. Hasil dari pemantauan digunakan untuk memperbaiki kelemahan dan menyesuaikan pengendalian terhadap perubahan kondisi internal maupun eksternal organisasi.

2.5 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian dengan topik yang hampir sama telah dilakukan oleh penelitian-penelitian sebelumnya.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	Sintiani, Y. (2023). Analisis sistem informasi akuntansi dan pengendalian internal dalam ketepatanwaktuan pelaporan keuangan sesuai SAP No. 71 Tahun 2010 (Studi Kasus: Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah). Universitas Islam Sultan Agung	Penelitian ini menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi dan pengendalian internal berperan penting dalam meningkatkan ketepatanwaktuan dan keandalan pelaporan keuangan di instansi pemerintah	Variabel dan Objek Penelitian, Fokus pada ketepatanwaktuan pelaporan keuangan instansi pemerintah
2.	Ramadhan, S. (2023). Analisis efektivitas sistem pengendalian internal dalam pengelolaan aset	Pengendalian internal yang baik terbukti efektif dalam mencegah kesalahan pengelolaan aset dan mendukung	Variabel dan Objek Penelitian, Fokus pada pengelolaan aset di Dinas Pertanian dan

No	Nama Penulis dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
	(Studi Kasus: Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah).	pelaporan keuangan yang akurat.	Perkebunan, bukan pelaporan keuangan secara umum.
3.	Farwitawati, R., & Arini, A. (2025). Efektivitas sistem pengendalian internal, sistem informasi akuntansi, dan akuntabilitas terhadap kualitas laporan keuangan di RSUD Petala Bumi. Jurnal Akuntansi Kompetif, 8(2).	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi akuntansi (SIA) dan sistem pengendalian internal (SPI) berperan penting dalam mendukung terwujudnya akuntabilitas dan meningkatkan kualitas laporan keuangan.	Objek Penelitian. Fokus meneliti rumah sakit daerah (RSUD Petala Bumi) dengan penekanan pada kualitas laporan keuangan.
4.	Argreshy, N. (2021). Analisis sistem informasi akuntansi terhadap akuntabilitas alokasi dana desa Kanawatu Kabupaten Luwu Timur di tengah pandemi Covid-19.	Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa Sistem informasi akuntansi yang terstruktur memperkuat akuntabilitas pengelolaan dana desa meskipun dalam keterbatasan pandemi.	Objek Penelitian, Fokus pada sistem informasi akuntansi terhadap akuntabilitas alokasi dana, bukan pengendalian internal.
5.	Simamora, M. S., Nurlaila, & Nur Inayah. (2021). Analisis penerapan sistem informasi akuntansi pada akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Desa Tanjung Selamat Kecamatan Percut Sei Tuan.	Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa Penerapan sistem informasi akuntansi berbasis komputer mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa.	Variabel dan Objek Penelitian, Fokus pada pengelolaan dana desa berbasis komputer, bukan pada instansi pemerintahan umum.
6.	Mulyani, S., & Daim, R. (2021). Analisis sistem	Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa Penerapan Sistem	Variabel dan Objek Penelitian, Fokus meneliti

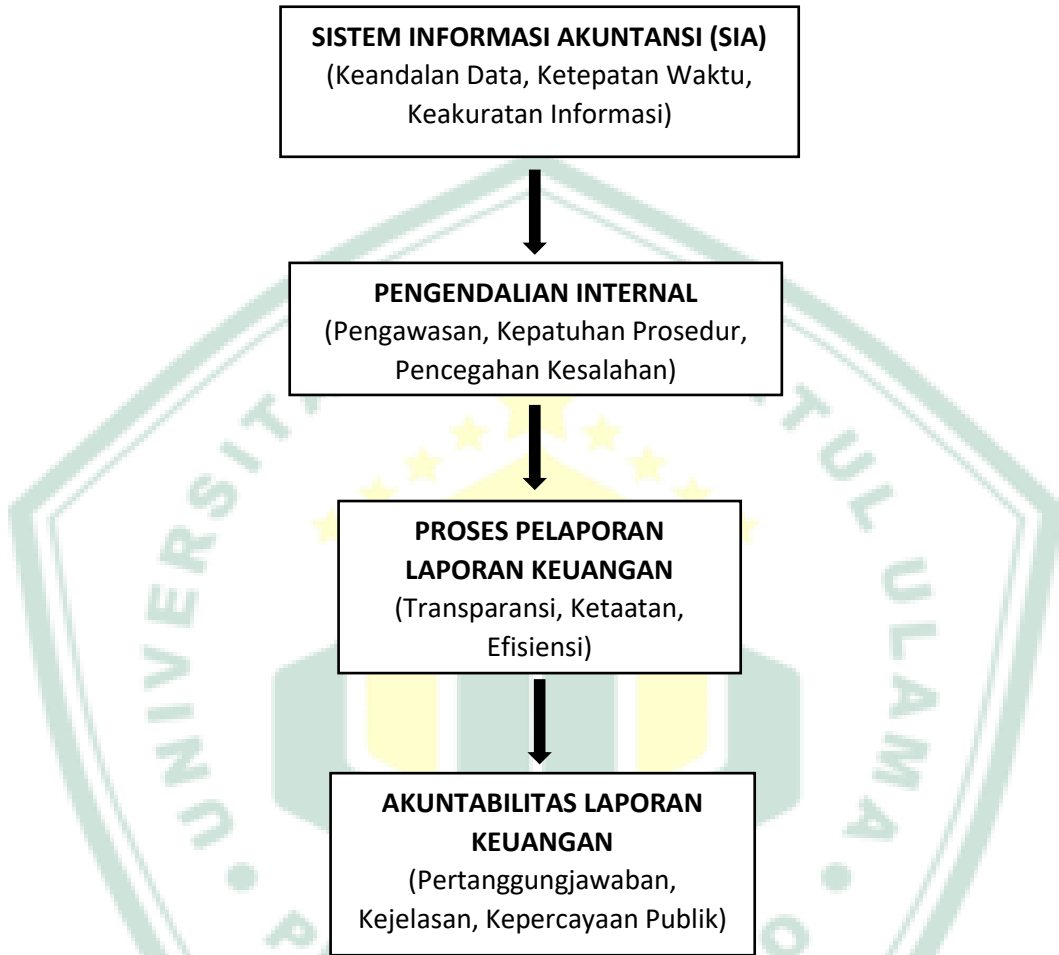
No	Nama Penulis dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
	informasi dalam meningkatkan kinerja bagian perencanaan dan keuangan pada Kantor Walikota Medan.	informasi yang efektif meningkatkan efisiensi kerja dan ketepatan dalam perencanaan keuangan pemerintah daerah	efisiensi kerja bagian perencanaan dan keuangan di lingkungan pemerintah daerah.
7.	Nispa Sari, M., Mutmainna, A., Wahida, A., & Rusli, A. (2022). Optimalisasi peran sistem informasi akuntansi desa dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan (Kecamatan Larompong Selatan). Universitas Muhammadiyah Palopo.	Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas keuangan sulit tercapai apabila penerapan sistem informasi akuntansi dan pengendalian internal tidak dilaksanakan secara konsisten.	Variabel dan Objek Penelitian, Fokus pada akuntansi desa dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan pemerintah desa.
8.	Rahayu, Ibrahim, S. D., Tulib, H., & Mahmud, M. (2022). Analisis sistem informasi Akuntansi pengendalian dan internal dalam peningkatan kualitas laporan keuangan di Pengadilan Negeri Universitas Negeri Gorontalo.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan kualitas sumber daya manusia serta kurangnya pelatihan dalam penggunaan sistem informasi akuntansi dapat menyebabkan keterlambatan pelaporan dan kesalahan dalam pencatatan transaksi keuangan	Variabel dan Objek Penelitian, Fokus meneliti instansi pemerintah daerah dengan tujuan meningkatkan kualitas laporan keuangan.
9.	Utari, R., & Harahap, J. P. R. (2024). Analisis sistem informasi akuntansi dalam meningkatkan efisiensi pelaporan	Hasil Penelitian ini bahwa Sistem informasi akuntansi meningkatkan efisiensi, kecepatan, dan akurasi pelaporan keuangan.	Variabel dan Objek Penelitian, Fokus pada efisiensi dan akurasi pelaporan keuangan, bukan

No	Nama Penulis dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
	keuangan Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Utara. UM Al-Washliyah.		hanya ketepatan waktu atau akuntabilitas.
10	Rahmattuwloh, E., Suherman, A., & Noor, I. (2024). Analisis kualitas pelaporan keuangan dalam upaya meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan di Puskesmas Bantargadung. <i>Akuntansi</i> 45, 5(2), 371–381.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan yang tinggi berperan dalam mendukung peningkatan akuntabilitas lembaga publik.	Objek Penelitian, Fokus penelitian di Puskesmas, mengaitkan kualitas laporan keuangan dengan akuntabilitas publik.

2.6 Kerangka Penelitian

Kerangka penelitian merupakan struktur pemikiran yang menguraikan keterhubungan logis antara variabel, konsep, dan teori dalam suatu kajian. Melalui kerangka ini, peneliti mengilustrasikan hubungan antara teori dasar dengan fenomena lapangan, sehingga analisis menjadi lebih terorganisir dan memfasilitasi integrasi teori dengan praktik empiris. Dalam penelitian ini, kerangka dikembangkan untuk menjelaskan interaksi antara implementasi Sistem Informasi Akuntansi (SIA), pengendalian internal, dan akuntabilitas laporan keuangan di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Dayeuhluhur. SIA diharapkan memungkinkan pencatatan dan pelaporan keuangan yang akurat, efisien, serta transparan, sedangkan pengendalian internal memastikan kegiatan keuangan sesuai prosedur. Kedua variabel ini berkontribusi langsung pada peningkatan akuntabilitas sebagai pertanggungjawaban pengelolaan keuangan publik. Hubungan antarvariabel didasarkan pada Teori Keagenan (*Agency Theory*), yang menekankan mekanisme pengawasan untuk menjaga keseimbangan antara pemberi amanah (pemerintah dan masyarakat) dengan penerima amanah (pengelola BPP). Ketiganya

diintegrasikan untuk mengevaluasi dampak SIA dan pengendalian internal terhadap akuntabilitas laporan keuangan di BPP tersebut, sebagaimana tergambar dalam diagram penelitian berikut:



Gambar 2. 1 Kerangka Berfikir

Sistem Informasi Akuntansi (SIA) dianggap sebagai elemen penting dalam mendukung pengelolaan serta pelaporan keuangan di berbagai institusi, termasuk Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Dayeuhluhur. SIA dirancang untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menyajikan data keuangan dengan tingkat akurasi dan relevansi yang tinggi, sehingga menjadi fondasi bagi pengambilan keputusan. Melalui SIA yang efektif, pencatatan transaksi keuangan dapat dilaksanakan secara sistematis, transparan, dan sejalan dengan standar akuntansi pemerintah. Implementasi SIA juga berkontribusi pada peningkatan efisiensi serta pengurangan risiko kesalahan dalam penyusunan

laporan keuangan, yang pada akhirnya memperkuat integritas data keuangan secara keseluruhan.

Selain itu, Sistem Pengendalian Internal (SPI) memainkan peran yang sama pentingnya dalam memastikan bahwa seluruh kegiatan keuangan dilakukan sesuai dengan prosedur dan regulasi yang berlaku. SPI meliputi kebijakan, prosedur, serta praktik pengawasan yang dikembangkan untuk memberikan jaminan atas keandalan laporan keuangan, efektivitas operasional, dan kepatuhan terhadap peraturan. Di lingkungan BPP, SPI digunakan untuk mendeteksi serta mencegah potensi kesalahan atau penyimpangan dalam pengelolaan anggaran. Dengan pengendalian internal yang kuat, proses pelaporan keuangan menjadi lebih terjamin dan kredibel, sehingga risiko fraud dapat diminimalkan secara signifikan.

Integrasi antara SIA dan SPI menjadi landasan pokok untuk mencapai Akuntabilitas Laporan Keuangan. Akuntabilitas menunjukkan sejauh mana suatu lembaga mampu mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangannya kepada publik dan stakeholder terkait. Dalam konteks BPP Dayeuhluhur, akuntabilitas laporan keuangan melibatkan aspek transparansi, integritas, serta kejelasan dalam penyampaian informasi keuangan. Laporan keuangan yang akuntabel akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap performa lembaga serta memastikan bahwa setiap pemanfaatan dana publik dapat dipertanggungjawabkan secara etis dan profesional, yang mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan di sektor pertanian.

Berdasarkan kerangka berpikir tersebut, penerapan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) yang efektif dan Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang memadai berperan penting dalam mendukung terwujudnya laporan keuangan yang transparan, andal, dan akuntabel di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Dayeuhluhur. Kedua sistem tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan serta memperkuat tata kelola keuangan publik.